



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 31 (tiga puluh satu)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI
Hari, Tanggal	: Rabu, 14 Desember 2022
Pukul	: 15.30 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: M Sarmuji, S.E, M.Si /Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai kinerja Kementerian Investasi dan BKPM, dan target investasi sampai dengan Desember 2022.
Hadir	: 1. 32 orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Investasi/ Kepala KPM RI, Bapak Bahliil Lahadalia; Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/BKPM RI pada pukul 16.14 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 14 Desember 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M Sarmuji, S.E, M.Si.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima paparan Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terkait dengan kinerja kementerian dan realisasi target investasi tahun 2022 sampai pada bulan September 2022 sebesar Rp 892,4 Trilyun atau 74,4% dari target Presiden RI sebesar Rp 1200 Trilyun dan meminta kementerian untuk meningkatkan kinerja agar target realisasi penyerapan anggaran dan realisasi investasi tahun 2022 dapat tercapai.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/ BKPM RI untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan negara G20 dalam bidang investasi pada pertemuan *Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting* (TIIMM) agar realisasi investasi PMA dapat meningkat.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/ BKPM RI untuk menyusun strategi dan mitigasi yang matang serta melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya dalam mengajukan banding sengketa larangan ekspor nikel di WTO agar program pemerintah terkait hilirisasi industri bahan mineral mentah dapat dilanjutkan.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/ BKPM RI untuk mengoptimalkan sistem OSS-RBA (*Online Single Submission - Risk Base Licensing Approach*) khususnya bagi UMKM dengan cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama ini.
5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/ BKPM RI untuk menyusun langkah-langkah dan strategi yang antisipatif dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi capaian target investasi pada tahun 2023.
6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/BKPM RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.02 WIB.

**MENTERI INVESTASI/
KEPALA BKPM RI,**

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

M SARMUJI, S.E, M.Si

A-318